



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN)
UNIT KERJA : PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD ASWAD
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 413643

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.860.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/117 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
2. Tanah Seluas 214 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 189 m2/147 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 400.000.000

1. MOBIL, HONDA FREED Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 184.900.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.505.872.933**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 5.950.772.933**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 5.950.772.933**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.